



Saat hutan lindung gambut bertemu dengan pemenuhan kebutuhan hidup

Oleh: Jasnari dan Putra Agung

foto: Putra Agung

Sungai Bram Itam, sesuai namanya, memiliki air yang berwarna hitam, khas sungai di daerah bergambut. Sungai ini mengalir melewati kawasan hutan bergambut dan akhirnya bermuara di Sungai Pengabuan. Bram Itam kemudian diabadikan menjadi nama sebuah kecamatan, di mana desa-desa yang berada di sekitarnya juga diberikan nama yang sama: Bram Itam Kanan dan Bram Itam Kiri. Hutan disekitar daerah ini ditetapkan sebagai kawasan hutan negara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 421/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi.

Membicarakan hutan, yang terlintas di benak adalah sebuah kawasan ekosistem kompleks yang dihuni oleh beraneka flora dan fauna dengan beragam fungsi yang dikandungnya, apalagi bila hutan yang dimaksud adalah hutan di kawasan gambut. Salah satu fungsi dari hutan adalah sumber penghidupan bagi masyarakat dari hasil kayu maupun bukan kayu.

Berbagai jenis pohon penghasil kayu yang tumbuh di hutan bergambut wilayah Tanjung Jabung Barat merupakan potensi sumberdaya daya alam yang menggiurkan bagi masyarakat sebagai sumber penghidupan. Apalagi tuntutan kebutuhan kayu di daerah pasang surut dan bergambut lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Kedua hal tersebut menjadi latar belakang mengapa masyarakat di sekitar hutan menjadikan hutan sebagai ladang mengais rezeki. Keterbatasan sumber mata pencaharian menjadi alasan jamak dan klasik yang muncul dari para pekerja kayu, yang memang tidak memiliki alternatif sumber penghasilan lain saat ini.

Menebang kayu dari generasi ke generasi

Para pekerja kayu di Bram Itam dan sekitarnya sebenarnya menyadari bahwa tempat mereka beroperasi saat ini adalah kawasan hutan negara dengan fungsi hutan lindung gambut (HLG). Namun demikian, kegiatan berkayu sudah cukup lama diusahakan masyarakat, bahkan sudah dilakukan sejak era tahun 1960-an menggunakan peralatan sederhana. "Gergaji mesin (*chain saw*) baru dikenal masyarakat

pada akhir tahun 1970-an ketika perusahaan HPH PT. Betara Agung Timber beroperasi di wilayah ini", demikian cerita dari salah seorang mantan pekerja kayu bernama Agus. Hingga awal tahun 1990 sangat mudah mendapatkan kayu pilihan, sehingga tidak perlu pergi jauh ke dalam hutan. "Namun, berkurangnya potensi kayu komersial yang ada di hutan menyebabkan aktivitas pembalakan mulai berkurang, terutama sejak pertengahan tahun 2000", kata Pak Agus.

Menurut seorang pekerja kayu, di salah satu lingkungan rukun tetangga (RT) di Desa Bram Itam Kiri, hingga saat ini masih banyak masyarakat (sekitar 50 Kepala Keluarga (KK) dari total 60 KK) yang sumber kehidupannya dari mencari kayu di hutan. "Kalau dirata-ratakan mungkin 70-80 % sumber kebutuhan rumah tangga masyarakat di lingkungan sini bersumber dari hasil mencari kayu di hutan, bahkan mungkin ada yang 100% termasuk saya", demikian sumber ini menjelaskan. "Kerja mencari kayu sudah mulai kami jalani sejak pertengahan tahun 1980-an hingga sekarang. Hampir tidak ada kesempatan lagi untuk berkebun sehingga jangan ditanya apa kami punya kebun atau tidak. Kami belum punya pilihan pekerjaan selain mencari kayu di hutan" tambahnya lagi.

Kayu semakin berkurang... dari mana bisa didapat?

Luas hutan dan potensi kayu di Tanjung Jabung Barat setiap hari terus menurun akibat aktivitas pembalakan dan alih fungsi hutan untuk lahan

pertanian oleh masyarakat maupun perusahaan, serta izin pengelolaan lahan oleh perusahaan hutan tanaman industri berskala besar. Kawasan Hutan Produksi (HP) ataupun Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang seharusnya berpotensi untuk pemenuhan bahan baku kayu juga tidak luput dari praktik-praktik pembalakan, bahkan HLG Bram Itam yang seharusnya menjadi daerah "eksklusif" karena statusnya yang dilindungi, tidak luput dari aktifitas pembukaan lahan untuk pertanian dan operasi pembalakan. Bila kondisi ini terus berlangsung, maka bagaimana kebutuhan kayu di masa mendatang dapat dipenuhi?

Dari sisi kebijakan dan ruang, program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) menjadi harapan untuk pemenuhan kebutuhan kayu berbasis masyarakat. Namun pada kenyataannya, pencadangan areal HTR seluas 2.280 di Kecamatan Batang Asam dan Renah Mendaluh sejak tahun 2009 juga mengalami nasib serupa dengan areal HLG, beralih fungsi menjadi lahan perkebunan. Berdasarkan kondisi tersebut, mungkinkah HTR menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan kayu? Atau mungkin justru kebun campur berbasis pohon yang selama ini dipraktikkan masyarakat menjadi pilihan paling tepat?

Dengan segala kompleksitas permasalahan yang ada, keberlanjutan pemenuhan kebutuhan kayu dari kawasan hutan negara di Tanjung Jabung Barat memerlukan upaya dan komitmen serius dari berbagai pihak dalam merencanakan dan mempraktikkan program-program yang dapat diimplementasikan bersama masyarakat.